

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada OPD Kabupaten Sukoharjo)**

**Putri Nur Handayani¹⁾
Rispanyo²⁾
Sunarti³⁾**

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ putrinurhandayani000@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of application of government accounting standards on quality of region's government financial reports, the effect of human resource competencies on quality of regions's government financial reports, the effect of the role of internal audit on quality of regin's government financial reports, and to determine the effect of the application of government accounting standards, human resources, the role of internal audits on the quality of region's government financial reports.

This study belongs to quantitative research. The sample was determined by purposive sampling technique used 161 sample. Data analysis was done by using multiple regression with the help of SPSS V21 software.

The results showed that the application of government accounting standards had a positive and significant effect on the quality of region's government financial report, human resource competence had a positive and significant effect on the quality of region's government financial reports, the role of internal audit had a positive and significant effect on the quality of region's government financial reports, and the application of government accounting standards, human resource competencies, the role of internal audit had a significant effect on the quality of region's government financial reports.

Keywords: *Application of Government Accounting Standards, Competence of Human Resources, Role of Internal Audit, Quality of Regional Government Financial Statements*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan demokrasi dengan segala bentuk pemerintahan dan segala aturan yang harus ditaati oleh segala aspek masyarakat terutama para pegawai yang bergerak pada bidang pemerintahan. Pemerintah pusat selalu melakukan evaluasi dan peningkatan pelayanan, maupun aturan yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah tiap tahunnya. Pemerintah daerah juga diharuskan meningkatkan pelayanan, sarana, prasarana, pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dari berbagai aspek. Pemerintah mewajibkan menyusun laporan keuangan tiap tahun bahkan tiap bulannya dan segala bentuk pertanggung jawaban guna untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran daerah secara berkala, untuk mengelola aset daerah dan sebagai pengambilan keputusan bagi kepala pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi. Pemerintah juga mempunyai standar yang khusus untuk membentuk laporan keuangan yang mungkin berbeda dengan laporan keuangan dari perusahaan pada umumnya yakni menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah dibuat guna untuk menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menyusun laporan keuangannya hingga menjadi laporan keuangan yang berkualitas serta mudah dipahami oleh segala lapisan.

Bentuk pertanggung jawaban pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah yakni bahwa Pemerintah Pusat maupun Daerah diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawabannya melalui laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah disusun dengan mengikuti aturan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yakni dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam Karesidenan Surakarta yang terletak tidak jauh dari kota Surakarta dengan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 40 termasuk Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan. Menurut data yang diperoleh dari *website* resmi <https://ppid.sukoharjokab.go.id> menyatakan bahwasanya Kabupaten Sukoharjo mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah sendiri, Kabupaten Sukoharjo mendapatkan 4 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2015 sampai dengan 2018 (<https://semarang.bpk.go.id>). Permasalahan yang terjadi berdasarkan data diatas bahwa Kabupaten Sukoharjo masih terjadi masalah dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang harusnya dilaksanakan sesuai dengan aturan pemerintahan yang berlaku

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (2015:1) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bagaimana cara agar laporan keuangan dapat terstruktur dan sistematis. Tujuan laporan keuangan menurut (PSAK Nomor 1, 2015:3) adalah memberikan segala informasi keuangan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas yang bermanfaat sebagai pengambilan keputusan ekonomi yang dilakukan oleh pengguna informasi keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah menurut (Sholeh, Chabib dan Suropto, 2011) antara lain: laporan realisasi anggaran, neraca daerah, laporan aliran kas, catatan atas laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diberlakukan untuk menyusun dan melaporkan keuangan pemerintah. Laporan keuangan yang berlaku di Indonesia yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan pokok yang disajikan dalam standar akuntansi pemerintah antara lain: laporan realisasi anggaran, neraca, laporan aliran kas, catatan atas laporan keuangan. Basis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yakni: standar akuntansi pemerintah berbasis kas dan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna informasi laporan keuangan, untuk mencapai hal tersebut maka standar akuntansi pemerintah menetapkan seluruh pertimbangan dalam penyajian laporan keuangan, pedoman-pedoman maupun rangkaian dalam laporan keuangan dan syarat minimum isi laporan keuangan (Zeyn, 2011).

Kompetensi sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam suatu pemerintahan yang menjadi penentu berjalan atau tidak suatu pemerintahan. Kompetensi merupakan karakter seseorang untuk mengindikasikan cara berpikir, sikap, serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan seseorang pada waktu tertentu (Moehariono, 2009:3). Kompetensi sumber daya manusia sendiri sangat berpengaruh terhadap apa yang akan dihasilkan sumber daya tersebut apakah sudah sesuai dengan bidangnya atau

tidak sesuai dengan bidangnya. Kompetensi sumber daya manusia pada pemerintah sendiri berarti kemampuan yang harusnya dimiliki aparat pemerintah berupa pengetahuan, sikap, perilaku dan ketrampilan yang sangat diperlukan untuk melaksanakan tugasnya (Aruan, 2003). Hasil dari suatu pekerjaan dalam pemerintahan adalah dengan adanya laporan dari setiap pemerintah pusat maupun daerah, jika kualitas laporan yang dihasilkan buruk maka bisa disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia sendiri kurang berkompeten dalam bidangnya dan begitu sebaliknya.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (I) UU Nomor 15 Tahun 2004 menerangkan bahwa penyelenggaraan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, hasil dari pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah dapat dimanfaatkan oleh BPK dalam mengevaluasi per daerah. Peran audit internal dan fungsi audit internal bagi pemerintah sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah. Pengendalian intern dibidang keuangan dalam suatu pemerintahan sendiri yakni menggunakan audit internal pemerintah dalam mengungkapkan laporan keuangan tersebut layak atau tidak laporan keuangan tersebut disajikan. Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah sekarang ini dilakukan oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yakni Inspektorat (semisal Inspektorat Jenderal, Inspektorat Utama, Inspektorat Daerah) maupun juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

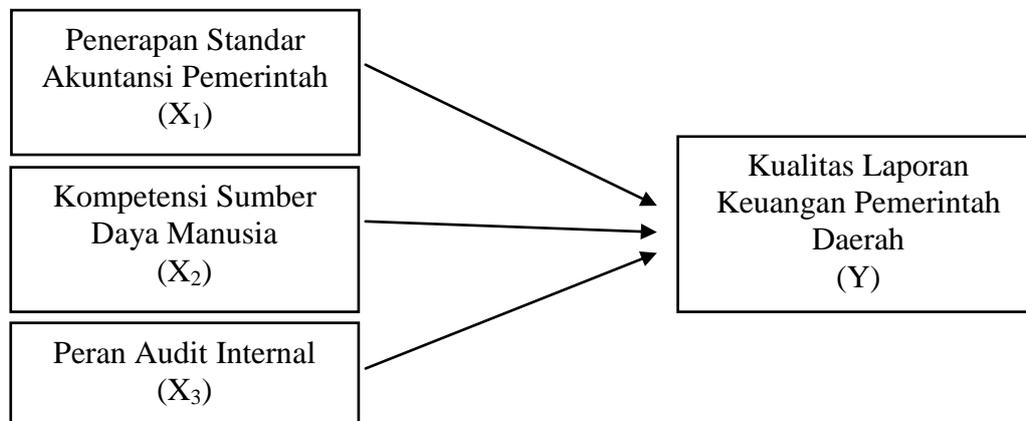
Menurut uraian diatas dapat dikatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, peran audit internal adalah salah satu faktor terpenting untuk menentukan berkualitas atau tidaknya laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) “Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, peran audit internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?” 2) “Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, peran audit internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?”.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wati, Nyoman, Ni Kadek (2014) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Peneliti Udiyanti, dkk (2014) menyebutkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Mahardini (2018) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menurut Karsana (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, berdasarkan penelitian dari Nazaruddin dan Syahrial (2017) menyatakan bahwa peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo.

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat, yaitu: pertama, manfaat teoritis adalah dengan adanya penelitian ini, mahasiswa diharapkan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, peran audit internal. Kedua, manfaat praktis adalah dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan saran-saran serta dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE

Penelitian ini dilakukan pada OPD Kabupaten Sukoharjo. Penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian kuantitatif karena data yang digunakan dan diolah berbentuk angka. Sumber utama yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari para aparatur di OPD Kabupaten Sukoharjo. Data tersebut berupa data primer. Data primer dilakukan secara langsung melalui penyebaran kuesioner/angket tiap-tiap OPD di Kabupaten Sukoharjo.

Populasi dalam penelitian ini adalah para aparatur dibidang keuangan, bendahara dan subjek APiP di OPD yang meliputi dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Kecamatan dengan jumlah instansi sebanyak 40 instansi. Populasi untuk penelitiann ini sebanyak 38 OPD dan berjumlah 272 orang yang tersebar di Kabupaten Sukoharjo.

Metode pengambilan sampel yang digunakann adalah penggunaan teknik *purposive sampling*. Kriteria penentuan sampel pada penelitian ini adalah pegawai pada bidang keuangan, bendahara bidang per instansi, subjek APiP. Berdasarkan hasil dari rumus Slovin dalam penelitian ini, sehingga didapatkan hasil sebanyak 161 responden di 38 instansi dengan tingkat kesalahan 5%. Kuesioner dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk skala likert dengan pilihan jawaban alternatif 5 dan perhitungan skor 1-5 yakni Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

Variabel bebas dalam penelitian ini yakni penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, peran audit internal, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS V21. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji parsial (t), uji simultan (F), uji koefisien determinasi (R²).

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah (X₁), kompetensi sumber daya manusia (X₂), peran audit internal (X₃) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Model regresi yang digunakan dengan menggunakan persamaan regresi menurut (Sugiyono, 2011:277):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 α : Konstanta
 β : Koefisien Regresi
 X_1 : Penerapan Standat Akuntansi Pemerintah
 X_2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia
 X_3 : Peran Audit Internal
e : Tingkat Kesalahan (*error*) atau tingkat gangguan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil keseluruhan uji validitas menunjukkan hasil *p value* < 0,05, yang berarti seluruh variabel dapat diukur atau digunakan dan hasil keseluruhan uji reliabilitas menunjukkan *cronbach's alpha* > 0,60, yang berarti seluruh variabel yang digunakan dapat diukur konsistensi instrumen penelitiannya.

Dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antar ketiga variabel yang digunakan karena nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi antar ketiga variabel yang digunakan karena *p value* < 0,05. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa model regresi linear berganda tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi *p value* > 0,05. Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan menggunakan *Test Normality Kolmogorov-Smirnov* dengan kriteria *p value* > 0,05.

Berdasarkan uji yang dilakukan, sehingga dapat ditentukan persamaan regresi yakni sebagai berikut:

$$Y = 0,504 + 0,193 X_1 + 0,134 X_2 + 0,348 X_3 + e$$

Berdasarkan hasil uji regresi, diketahui bahwa masing-masing variabel bebas yakni penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, peran audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, selain itu, tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas < 0,05, hal ini berarti bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji t, menunjukkan hasil bahwa keseluruhan hipotesis masing-masing variabel terbukti kebenarannya karena nilai signifikansi < 0,05. Hasil uji F, menunjukkan nilai signifikansi < 0,05, hal ini berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan hasil bahwa sumbangan pengaruh variabel bebas penerapan standar akuntansi pemerintah (X_1), kompetensi sumber daya manusia (X_2), peran audit internal (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 69,1%, sisanya sebesar 30,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 1. Hasil Regresi Linear Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,504	1,823		0,277	0,782
Penerapan SAP	0,193	0,027	0,503	7,143	0,000
Kompetensi SDM	0,134	0,054	0,140	2,490	0,014
Peran Audit Internal	0,348	0,091	0,281	3,838	0,000
F	120,327				
Signifikansi F	0,000				
R	0,835				
R ²	0,697				
Adjusted R	0,691				

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil pendistribusian kuesioner kepada masing-masing OPD di Kabupaten Sukoharjo dapat dijelaskan bahwa kuesioner yang disebar sebanyak 179 kuesioner, kuesioner yang kembali sebanyak 161 kuesioner yang berarti seluruh kuesioner yang disebar kembali sesuai harapan dan sesuai dengan sampel yang sudah ditentukan, jadi kuesioner yang digunakan sebanyak 161, presentase tingkat pengembalian kuesioner sebesar 100%.

Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan analisis statistik pada tabel 1 dalam penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 0,193, hal ini berarti penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan nilai signifikansi penerapan standar akuntansi pemerintah adalah $0,000 < 0,05$, hal ini berarti penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, jadi hipotesis pertama (H_1) diterima yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah, maka akan semakin meningkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah yang baik harusnya berpedoman pada standar yang ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yakni standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah merupakan pondasi awal dalam melakukan atau menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan laporan keuangan yang dihasilkan akan digunakan sebagai pembuat keputusan ekonomi bagi pemerintah untuk membentuk suatu kebijakan ekonomi, peningkatan pengelolaan pemerintahan dll.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahardini (2018), Wati, dkk (2014), Udiyanti, Anantawikrama, Nyoman (2014), Karsana dan Gusti (2017) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan analisis statistik pada tabel 1 dalam penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,134, hal ini berarti kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan nilai signifikansi kompetensi sumber daya manusia adalah $0,014 < 0,05$, hal ini berarti kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, jadi hipotesis pertama (H_2) diterima yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka akan semakin meningkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kemampuan seorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan bekal pendidikan, pengalaman yang cukup memadai dan pelatihan yang sudah diberikan (Afrianti, 2011), Komponen laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan baik tersusun dari sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati, dkk, (2014), Udiyanti, dkk (2014), Mahardini (2018), Karsana dan Gusti (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia meliputi keahlian dan bidang yang dimilikinya, pendidikan yang sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab tugasnya.

Pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan analisis statistik pada tabel 1 dalam penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi peran audit internal sebesar 0,348, hal ini berarti peran audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan nilai signifikansi peran audit internal adalah $0,000 < 0,05$, hal ini berarti peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, jadi hipotesis pertama (H_3) diterima yaitu peran audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin baik peran audit internal, maka akan semakin meningkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai SPIP, audit internal tidak terbatas pada pengawasan keuangan tetapi juga mendapat peran baru mengenai pembinaan/konsultasi disamping melakukan *review* laporan keuangan pemerintah. Peran audit internal dapat memberikan kontribusi yang lebih mengenai peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena peran audit internal merupakan elemen dalam pengendalian internal pemerintah dan sangat berkaitan erat dengan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh para aparatur dalam pemerintahan. Kualitas yang dihasilkan oleh audit internal terhadap instansi yang diaudit berupa adanya ketepatan waktu, keakuratan dalam mengevaluasi laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan per instansi, agar terwujudnya transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nazarudin dan Syahril, 2017) yang menyatakan bahwa peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Audit internal memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan pemerintah, memberikan saran dan rekomendasi yang dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan analisis statistik pada tabel 1 dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai signifikansi F sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$, hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara

penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahardini (2018), Wati, dkk (2014), Udiyanti, Anantawikrama, Nyoman (2014), Karsana dan Gusti (2017) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan yang baik tidak terlepas dari standar yang sudah ditetapkan dan dijalankan oleh para aparatur. Standar akuntansi pemerintah merupakan hal pokok dan paling mendasar dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati, dkk, (2014), Udiyanti, dkk (2014), Mahardini (2018), Karsana dan Gusti (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipahami oleh pengguna informasi sebagai pengambilan keputusan ekonomi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nazarudin dan Syahrial, 2017) yang menyatakan bahwa peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Audit internal merupakan salah satu komponen dalam sistem pengendalian internal pemerintah karena audit internal dapat memberikan rekomendasi guna untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan suatu instansi. Salah satu tujuan audit adalah mengatur dan mengevaluasi pengendalian intern suatu instansi, namun pengendalian intern sering tidak berjalan sesuai dengan konsep dan aturan yang berlaku karena kurangnya tanggung jawab para aparatur dalam menjalankan tugasnya dan sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di instansi demi kepentingan sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dari pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: pertama, penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti jika penerapan standar akuntansi ditingkatkan, maka kualitas laporan keuangan semakin meningkat. Kedua, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti jika kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keahliannya, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin meningkat. Ketiga, peran audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti jika peran audit internal dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan aparat akan meningkat. Keempat, penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, peran audit internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti jika penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, peran audit internal diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan meningkat.

KETERBATASAN

Berdasarkan uji diatas, peneliti menyadari ada beberapa keterbatasan yang dimiliki peneliti yaitu: Pertama, peneliti hanya berfokus pada OPD di Kabupaten Sukoharjo dengan jumlah responden yang terbatas, sehingga penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terbatas. Kedua, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, terdapat variabel lain yang belum dimasukkan dan memiliki kemampuan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah. Ketiga, data yang diperoleh peneliti hanya menggunakan kuesioner tanpa melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait. Keempat, Proses pengambilan data dan sampel dilakukan pada saat OPD dalam proses pemeriksaan dari Inspektorat dan BPK, sehingga peneliti kurang memahami kelemahan dan kelebihan per masing-masing instansi karena per masing-masing instansi masih mengerjakan laporan pertanggung jawaban dan mempersiapkan berkas-berkas yang terkait dengan proses audit.

SARAN

Berdasarkan keterbatasan diatas, maka dapat diajukan saran yaitu: Pertama, peneliti selanjutnya, sebaiknya memperluas jangkauan wilayah penelitian sehingga responden dapat memberikan jawaban yang beraneka ragam. Kedua, hasil penelitian ini menunjukkan *Adjusted R Square* sebesar 69,1%, sisanya 30,9% dipengaruhi oleh variabel lain, sehingga peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang memungkinkan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti sistem akuntansi keuangan daerah, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ketiga, selain mendapatkan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden, disarankan untuk mendapatkan data melalui wawancara kepada responden yang terkait guna untuk menguatkan penelitian yang akan dilakukan. Keempat, untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian setelah laporan pertanggung jawaban tiap OPD disusun/diproses, agar peneliti dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dimiliki tiap OPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah* diakses tanggal 19 Oktober 2019.
- _____. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara* diakses tanggal 29 Oktober 2019.
- _____. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara* diakses tanggal 19 Oktober 2019.
- _____. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah* diakses tanggal 19 Oktober 2019.
- Aruan, N. (2003). *Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Studi Empiris di Jawa Timur*. Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur. Jawa Timur.
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK Nomor 1. Edisi Revisi 2015. *Penyajian Laporan keuangan*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Karsana, I Gusti. 2017. "Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, Dan SPI pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Volume 21 No. 1. Hal 643-670.
- Mahardini. 2018. "Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015". *Jurnal Akuntansi*. Volume 5 No. 1.
- Moehirono. 2009. "*Pengaruh Kinerja Berbasis Kompetensi*". Ghalia Indonesia. Surabaya.
- Nazaruddin, Syahrial. 2017. "Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe)". *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*. Volume 3 No. 1.
- Sholeh, Chabib dan Suropto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Fokusmedia. Bandung.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

- Udiyanti, Anantawikrama, Nyoman. 2014. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng)". *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Volume 2 No. 1.
- Wati, Nyoman, Ni Kadek. 2014. "Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Volume 2 No. 1.
- Zeyn, Elvira. 2011. "Pengaruh *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi". *Jurnal Akuntansi*. Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat.
- <https://semarang.bpk.go.id> diakses tanggal 29 Oktober 2019.
- <https://ppid.sukoharjokab.go.id> diakses tanggal 19 Oktober 2019.